



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PULAU TABALINGE KABUPATEN PULAU MOROTAI

Rusman Rasyid^{1*}, Endang Purwati², Andi Tenri Pada Agustang³, Nurhalisa J Lutfi⁴

¹²³⁴ Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

Email: rusman_rasyid68@unkhair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek secara sistematis, faktual dan aktual mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata Pulau Tabalinge Kabupaten Pulau Morotai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat tidak berpartisipasi secara langsung pada tahap perencanaan pengelolaan dan pengembangan objek wisata Pulau Tabalinge melainkan berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan secara top-down baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Begitupun pada tahap pengawasan dan evaluasi, masyarakat sudah berpartisipasi meskipun hanya sebatas kegiatan preventive untuk mencegah tindakan negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta cenderung hanya bersifat pemberian informasi, dimana masyarakat hanya sebagai penerima informasi dari pemerintah terkait pengawasan yang dilakukan tetapi tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan balik.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan dan pengembangan objek wisata; Pulau Tabalinge.

Abstract

This paper attempts to provide an overview of the main findings and conclusions of the research conducted. The primary objective of this study is to provide a systematic, accurate, and impartial description of how the public participates in the oversight and growth of tourism attractions on Tabalinge Island, located in the Morotai Island geographical area. The research methodology employed in this study is qualitative descriptive research, which involves the collection of data through observations, interviews, and documentation. The findings of this study indicated that the general public did not engage directly in the initial planning stage of the management and development of Tabalinge Island as a destination for tourists. Rather, their involvement was observed to be limited to providing feedback and suggestions during public consultations held after the initial planning stage. This lack of direct engagement from the general public may have resulted in disconnect between the tourism attractions offered on Tabalinge Island and the preferences and needs of potential tourists. Additionally, it highlights the importance of incorporating community input and involvement in future management and development plans to ensure a more inclusive and sustainable tourism destination. During the subsequent implementation phases of management and service provision, which followed a top-down approach encompassing both tangible and intangible aspects, in the phase of evaluation and monitoring, there is restricted public participation in preventive measures aimed at mitigating security and order disruptions. This involvement primarily entails the dissemination of information, with the public acting as passive recipients of government updates regarding surveillance efforts. However, opportunities for public feedback are not provided.

Keywords: Public participates; Oversight and growth of tourism attractions; Tabalinge Island.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah adalah sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata memiliki kekuatan penggerak roda perekonomian yang tidak hanya terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga yang terpenting adalah pengembangan pariwisata yang mampu membangun semangat kebangsaan dan apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa (Heryati, 2019). Selain itu, pengembangan pariwisata dapat mendorong terjadinya perubahan dalam pemanfaatan lahan, serta memberi dampak terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi (Khodyat dalam Afandi & Ali, 2015)

Melihat dampak positif tersebut, berbagai daerah di Indonesia termotivasi untuk mengembangkan dan mengelola potensi pariwisatanya dengan baik. Salah satunya adalah objek wisata Pulau Tabalinge yang terletak di Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara. Dimana objek wisata tersebut memiliki potensi keindahan alam yang begitu menakjubkan dengan bentuk pulau yang oval dan memanjang dengan hamparan pasir putih dan ditumbuhi pepohonan hijau, serta keindahan laut yang jernih, kaya akan terumbu karang dan hewan laut. Potensi tersebut dapat menjadi asset utama untuk digali dan dikembangkan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Yuniarti, Soekmadi, Arifin, & Noorachmat, 2018). Namun, perlu diingat bahwa pengembangan pariwisata akan kurang berarti apabila masyarakat lokal itu sendiri tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata. Artinya masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata (Darmayanti & Nugroho, 2018). Bahkan dapat diharapkan agar peran serta masyarakat harus dapat menjadi kunci keberhasilan yang harus diwujudkan dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pokok program pembangunan pariwisata (Syahdan, Latupapua, & Seipalla, 2020). Hal tersebut dilakukan dengan harapan pengelolaan dan pengembangan objek wisata yang ada akan lebih terjamin dan terarah dalam membantu pembangunan objek wisata yang dapat meningkatkan daya tarik para wisatawan yang

akan membawa dampak positif bagi masyarakatnya dalam perekonomian, sosial maupun menyadarkan bahwa pentingnya melestarikan objek wisata tersebut (Utami, Pratiwi, & Ayuningtyas, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sebuah kajian dalam mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pulau Tabalinge Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk saling bersinergis demi terciptanya sebuah konsep pengembangan pariwisata yang tepat sasaran serta mendatangkan dampak positif untuk kehidupan di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk mendeskripsikan suatu objek secara sistematis, faktual dan aktual. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata, anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat setempat sebagai pihak pengelola. Guna memperoleh data dan informasi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata Pulau Tabalinge, dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder secara langsung pada objek atau lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dan informasi baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran informasi masalah secara sistematis, jelas dan mendalam. Selanjutnya, hasil dari gambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan dukungan teori yang berkaitan dengan objek yang diteliti untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kepariwisataan (Palimbunga, 2017). Dalam mengembangkan suatu daya tarik wisata, partisipasi atau keterlibatan masyarakat lokal tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab masyarakat lokal merupakan orang yang

mengetahui kondisi daerahnya daripada orang yang berasal dari luar daerah. sehingga, partisipasi masyarakat lokal sangat diperlukan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan, serta pengawasan dan evaluasi (Ratnaningsih & Mahagangga, 2015). Secara detail bentuk kegiatan pengembangan objek wisata Pulau Tabailenge Kabupaten Pulau Morotai, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya. Bahkan menurut Hidayat (2011) menyatakan perencanaan adalah proses kumpulan kebijakan dan bagaimana mengimplementasikannya. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa masyarakat Pulau Tabailenge tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Hal ini didasarkan pada wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku pihak pengelola objek wisata Pulau Tabailenge menyatakan bahwa:

“proses perencanaan pengembangan objek wisata Pulau Tabailenge dilakukan oleh Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata Pulau Morotai, namun pada pelaksanaan dari perencanaan tersebut maka barulah kita melibatkan masyarakat setempat” (Hasil wawancara, 2022).

Penjelasan yang diberikan informan tersebut juga senada dengan keterangan yang diberikan oleh salah satu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) selaku pengelola objek wisata Pulau Tabailenge yang menyatakan bahwa:

“kalau dalam perencanaan kami tidak pernah di undang tapi kami diundang untuk menyaksikan program perencanaan yang sudah dibuat dan kami diajak bekerja sama dalam pengembangan objek wisata serta diberikan tanggung jawab untuk mengelola objek wisata pulau Tabailenge tersebut” (Hasil wawancara, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Sadar Wisata tersebut, diketahui bahwa segala bentuk penyusunan program atau

perencanaan pengembangan dan pengelolaan objek wisata Pulau Tabailenge dari dinas pariwisata tidak melibatkan masyarakat akan tetapi setelah dibuatnya beberapa program kemudian disampaikan kepada pihak Pokdarwis sekaligus mengajak Pokdarwis untuk bekerja sama selama program pengembangan dilakukan.

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan masyarakat sekitar objek wisata Pulau Tabailenge yang sekaligus sebagai salah satu pelaku usaha yang ikut mengelola objek wisata tersebut menyatakan bahwa:

“kami masyarakat tidak diundang atau dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pengembangan dan pengelolaan objek wisata, biasanya usulan kami sampaikan pada kegiatan musrembang, namun biasanya ide tersebut sulit terealisasi karna keputusannya tetap pada dinas terkait, tapi satu kesyukuran bagi kami bahwa pemerintah melalui Dinas Pariwisata masih mau menyampaikan program tersebut setelah sudah jadi dan tentu saja kami masyarakat sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah demi pengembangan objek wisata Pulau Tabailenge” (Hasil wawancara, 2022).

Berdasarkan beberapa wawancara tersebut dikatakan bahwa pihak yang berpartisipasi dalam perencanaan untuk mengembangkan objek wisata Pulau Tabailenge adalah Bagian Perencanaan, Dinas Pariwisata Pulau Morotai tanpa melibatkan masyarakat pada umumnya. Masyarakat biasanya hanya diikuti dalam musyawarah yang membahas aspirasi masyarakat secara umum seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dihadiri oleh perangkat desa, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para tokoh adat. Pada musyawarah ini biasanya masyarakat hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi termasuk pendapat mengenai pengembangan objek wisata Pulau Tabailenge, namun keputusan dan kebijakan tetap dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif penyusunan rencana pengembangan objek wisata Pulau Tabailenge masih datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Padahal pelibatan partisipasi masyarakat dalam memberikan

ide/gagasan maupun saran pada proses perencanaan sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan terwujudnya suatu destinasi wisata yang berkualitas (Syahdan, Latupapua, & Seipalla, 2020).

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan objek wisata Pulau Tabailenge ditemukan adanya keterlibatan masyarakat secara langsung atas pelaksanaan semua perencanaan yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata Pulau Morotai. Hal ini didasarkan pada wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa:

“Penyediaan fasilitas di objek wisata Pulau Tabailenge dilakukan oleh pemerintah dan dibantu oleh masyarakat selama pembangunan. Untuk pengelolaan objek wisata, pemerintah menyerahkan kepada masyarakat dengan tetap dikoordinir oleh Dinas Pariwisata sendiri” (Hasil wawancara, 2022)

Penjelasan tersebut diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh salah satu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menyatakan bahwa:

“Kami dari pokdarwis sudah menanda tangani surat perjanjian sebagai pengelola objek wisata Tabailenge bersama beberapa masyarakat sebagai pelaku usaha. bentuk pengelolaan yang kami lakukan adalah mengelola dalam hal kebersihan lingkungan serta melibatkan masyarakat yang menjadi penyedia jasa kuliner dan transportasi laut” (Hasil wawancara, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan objek wisata Pulau Tabailenge sudah melibatkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara *Top-down*. Dimana *top-down* merupakan proses yang dilakukan oleh atasan sebagai pemberi gagasan kepada bawahan (Darmayanti & Nugroho, 2018). Hal ini dikarenakan masyarakat hanya terlibat dalam melaksanakan semua perencanaan yang telah direncanakan oleh

pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Pulau Morotai. Namun meskipun demikian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata tetap saja penting sebagai alat untuk memecahkan masalah utama pariwisata umumnya di negara berkembang seperti Indonesia (Aref & Redzuan, 2008). Selain itu juga terlihat bentuk partisipasi masyarakat terlihat dalam bentuk fisik dan non fisik. Dimana bentuk fisik dilakukan secara gotong royong dalam menyiapkan sarana dan fasilitas bagi pengunjung, sedangkan dalam bentuk non fisik diberikan melalui pengaturan tata ruang fasilitas dan sarana penunjang serta pengelolaan dalam menunjang kebersihan kawasan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan & Hutagalung, (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam dimensi fisik dapat dalam pembangunan tempat wisata, yaitu untuk mempersiapkan lokasi kunjungan, pemandu wisata, penyediaan infrastruktur dan penyediaan peralatan untuk mendukung kegiatan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sangat diharapkan, sebab hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi (Palimbunga, 2018). Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi objek wisata Pulau Tabailenge ditemukan adanya keterlibatan masyarakat secara langsung pada kegiatan pengawasan dan evaluasi. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa:

“Dalam proses pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kami terus melibatkan masyarakat untuk memastikan perencanaan serta pengelolaan dan pengembangan objek wisata Pulau Tabailenge dapat berjalan sebagai mana mestinya” (Hasil wawancara, 2022)

Penjelasan tersebut diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh salah satu Kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan dan evaluasi namun sifatnya lebih banyak kepada mencegah tindakan-tindakan negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada objek wisata Pulau Tabalinge” (Hasil wawancara, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap objek wisata Pulau Tabalinge sudah melibatkan masyarakat meskipun hanya sebatas kegiatan *preventive* (mencegah tindakan negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban) dan cenderung hanya bersifat *informing* dimana masyarakat hanya sebagai penerima informasi dari pemerintah terkait pengawasan yang dilakukan tetapi tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan balik (Palimbunga, 2018). Padahal menurut pendapat Kurniawati, Eva, Hamid & Hakim (2018) bahwa masyarakat harus dilibatkan di setiap kegiatan pengembangan di Desa Wisata seperti keterlibatan dalam tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasional, tahap pengembangan, dan tahap pengawasan dan evaluasi. Dimana kegiatan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan memantau kesesuaian penggunaan anggaran, memantau lokasi pelaksanaan kegiatan, dan memantau jalannya kegiatan. Sementara kegiatan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti menilai hasil pelaksanaan program, dan menyampaikan kritikan terhadap kesalahan ataupun penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang sudah ditetapkan (Ignasius & Susilowati, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengelolaan objek wisata Pulau Tabalinge, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pada tahap perencanaan, masyarakat tidak berpartisipasi secara langsung, melainkan hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi termasuk pengembangan

objek wisata Pulau Tabalinge melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), tetapi keputusan dan kebijakan penyusunan rencana pengembangan objek wisata Pulau Tabalinge masih datang dari pemerintah.

2. Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan objek wisata Pulau Tabalinge, sudah melibatkan partisipasi masyarakat secara *Top-down* baik dalam bentuk fisik (gotong royong dalam menyiapkan sarana dan fasilitas bagi pengunjung) maupun non fisik (pengaturan tata ruang fasilitas dan sarana penunjang serta pengelolaan dalam menunjang kebersihan kawasan).
3. Pada tahap pengawasan dan evaluasi, pengelolaan objek wisata Pulau Tabalinge sudah melibatkan masyarakat meskipun hanya sebatas kegiatan *preventive* mencegah tindakan negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dan cenderung hanya bersifat pemberian informasi (*informing*) dimana masyarakat hanya sebagai penerima informasi dari pemerintah terkait pengawasan yang dilakukan tetapi tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan balik.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, R. L., & Ali, M. M. (2015). Kajian Pengaruh Keberadaan Kawasan Wisata Sangiran Terhadap Aspek Fisik, Aspek Ekonomi, dan Aspek Sosial Masyarakat. *Jurnal Teknik PWK*.
- Aref, F., & Redzuan, M. B. (2008). Barriers to Community Participation Toward Tourism Development in Shiraz, Iran. *Pakistan Journal of Social Sciences*.
- Darmayanti, P. W., & Nugroho, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Espa Yeh Panes Natural Hot Spring Resort Di Desa Penatahan Tabanan. *Jurnal Destinasi Pariwisata*.
- Hermawan, D., & Hutagalung, S. S. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Lampung Selatan. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Heryati, Y. (2019). Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tapandullu di Kabupaten

Mamuju. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*.

- Hidayat, M. (2011). Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*.
- Ignasius, & Susilowati, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pengembangan Desa Wisata Kementul. *Kritis*.
- Kurniawati, Eva, Hamid, D., & Hakim, L. (2018). Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
- Palimbunga, I. P. (2017). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa*.
- Palimbunga, I. P. (2018). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Tabalansu, Papua. *Jumpa*.
- Ratnaningsih, N. G., & Mahagangga, I. A. (2015). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*.
- Syahdan, H., Latupapua, Y. T., & Seipalla, B. B. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Ohoidertawun di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*.
- Utami, E. Y., Pratiwi, N. N., & Ayuningtyas, R. A. (2019). partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pengembangan Wisata Pantai Tanjung Belandang Kabupaten Ketapang. *JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*.
- Yuniarti, E., Soekmadi, R., Arifin, H. S., & Noorachmat, B. P. (2018). Analisis Potensi Ekowisata Heart Of Borneo di Taman Nasional Betung Karihun dan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*.